

## BAB II

### SEJARAH PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

#### A. Latar Belakang Berdirinya PMII

Berdirinya organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) adalah berawal dari keinginan kuat mahasiswa Nahdlatul Ulama atau *nahdliyin* untuk membentuk suatu wadah mahasiswa yang berideologi *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Ide ini tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organisasi Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama' dan Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPNU-IPPNU). Secara historis, PMII merupakan Departemen Perguruan Tinggi IPNU yang dibentuk dalam Mukhtamar III di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27-23 Desember 1959. Di dalam organisasi pelajar itu banyak terdapat mahasiswa yang menjadi anggotanya, bahkan mayoritas fungsionaris pengurus pusat IPNU-IPPNU adalah mahasiswa.<sup>1</sup>

Atas dasar itulah muncul keinginan untuk membentuk suatu wadah khusus yang menghimpun mahasiswa nahdliyin. Pemikiran ini sempat dibahas dalam Mukhtamar II IPNU di Pekalongan pada tanggal 1-5 Januari 1957. Keinginan tersebut belum ditanggapi serius karena kondisi di dalam IPNU sendiri masih pembenahan, yakni masih banyak fungsionaris pengurus IPNU-IPPNU yang berstatus mahasiswa. Dikhawatirkan jika

---

<sup>1</sup>Fauzan Alfas, *PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*, (Jakarta: PB PMII, 2006), h. 1.

terbentuk wadah baru bagi mahasiswa akan mempengaruhi perjalanan IPNU yang baru saja terbentuk.

Usaha untuk mendirikan suatu wadah yang khusus menghimpun mahasiswa nahdliyin sebenarnya sudah lama. Misalnya pada Desember 1955 di Jakarta berdiri Ikatan Mahasiswa NU (IMANU), di Bandung berdiri Persatuan Mahasiswa NU (PMNU), dan berdirinya Keluarga Mahasiswa NU (KMNU) di Surakarta. Langkah yang diambil Pengurus IPNU untuk menampung aspirasi mahasiswa nahdliyin dengan membentuk departemen perguruan tinggi IPNU pada kenyataannya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan mahasiswa nahdliyin tidak dapat duduk sebagai anggota Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia (PPMI), suatu konfederasi organisasi mahasiswa ekstra universitas. PPMI hanya menampung organisasi tingkat mahasiswa, bukan pelajar. Begitu juga untuk duduk dalam Majelis Mahasiswa Indonesia (MMI).<sup>2</sup>

Sebagai tindak lanjut dari keinginan mahasiswa nahdliyin untuk mendirikan sebuah wadah khusus mahasiswa terbukti pada Konferensi Besar IPNU di Kaliurang, Yogyakarta pada 14-16 Maret 1960. Dalam forum tersebut memutuskan terbentuknya suatu organisasi mahasiswa nahdliyin yang terpisah secara fungsional maupun struktural dari IPNU. Kemudian untuk mempersiapkan itu, dibentuklah panitia sponsor pendiri organisasi mahasiswa

---

<sup>2</sup>Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), *Sejarah Singkat PMII*, diakses 14 Maret 2025, [www.pmi.or.id](http://www.pmi.or.id).

yang terdiri dari 13 orang dengan tugas melaksanakan musyawarah mahasiswa nahdliyin seluruh Indonesia, bertempat di Surabaya.<sup>3</sup>

Adapun 13 sponsor pendiri organisasi mahasiswa nahdliyin itu adalah sebagai berikut:

1. Cholid Mawardi (Jakarta)
2. Said Budairy (Jakarta)
3. M. Sobich Ubaid (Jakarta)
4. M. Makmun Syukri (Bandung)
5. Hilman (Bandung)
6. H. Isma'il Makky (Yogyakarta)
7. Munsif Nahrawi (Yogyakarta)
8. Nuril Huda Suaidy (Surakarta)
9. Laily Mansur (Surakarta)
10. Abd. Wahab Jailani (Semarang)
11. Hisbullah Huda (Surabaya)
12. M. Cholid Narbuko (Malang)
13. Ahmad Husain (Makasar)

Sebelum melaksanakan musyawarah, tiga dari 13 sponsor yaitu, Hisbullah Huda, M. Said Budairy, dan Maksum Syukri pada 19 Maret 1960 mereka berangkat ke Jakarta menghadap ketua Partai NU, KH. DR. Idham Khalid untuk meminta nasehat sebagai pegangan pokok dalam musyawarah. Pada tanggal 24 Maret 1960

---

<sup>3</sup>A. Aziz, *Pergerakan Mahasiswa dan Dinamika Sosial di Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2018, h. 87.

mereka diterima oleh Ketua Partai NU. Dalam pertemuan tersebut selain memberikan nasehat juga menekankan hendaknya organisasi yang akan dibentuk itu benar-benar dapat diandalkan sebagai kader partai. Keadaan waktu itu memang sangat kondusif bagi organisasi mahasiswa untuk bersikap politis. Meningkatnya jumlah organisasi mahasiswa disertai oleh meningkatnya peran mereka secara kualitas dan terbentuknya kesempatan untuk mobilitas sosial di bidang politik.<sup>4</sup>

Dengan demikian, awal berdirinya PMII lebih dimaksudkan sebagai alat untuk memperkuat Partai NU. Perubahan status organisasi massa (Ormas) NU menjadi partai politik (Parpol) terjadi ketika dilaksanakan Mukhtar XIX di Kota Palembang, tanggal 26 April sampai 1 Mei 1952. Di antara keputusannya adalah terkait dengan pemisahan diri dengan Masyumi serta menyatakan diri sebagai Parpol. Ketika itu yang memimpin Ketua Muda Pengurus Besar NU adalah KH. Abdul Wahid Hasyim. Pemisahan diri dari Partai Masyumi juga didahului perdebatan yang cukup sengit sehingga akhirnya ditempuh jalan pemungutan suara. Hasilnya, 61 suara setuju, 9 suara menolak pemisahan, dan 7 suara abstain.<sup>5</sup>

Dengan keluarnya NU dari kelompok Masyumi yang diawali juga dengan keluarnya PSII tahun 1947 membawa gejolak

---

<sup>4</sup>Burhan D. magenda. "Gerakan Mahasiswa Indonesia dan Sistem Politik," Prisma Nomor 12, Desember 1977, h. 59

<sup>5</sup> Abdul Basid Adnan, *Kemelut di NU Antara Kyai dan Politisi*, (Surakarta: Maya Sari, 1982), h. 18.

di tubuh Masyumi. Meskipun demikian, NU tetap meminta pengertian dari Masyumi dan berharap agar tetap mempertahankan dirinya sebagai badan federatif Parpol yang berdasarkan Islam. Anggaran Dasar NU sebelum menjadi Parpol jelas disebutkan bahwa: “Adapun maksud perkumpulan ini yaitu memegang teguh pada salah satu dari madzhabnya Imam empat, yaitu Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah bin Nu’am, atau Imam Muhammad bin Hambal, dan mengerjakan apa saja yang sudah menjadi kemaslahatan agama Islam” (Pasal 2, Statuten Perkumpulan NU di Surabaya, 1926). Kemudian setelah NU menjadi Parpol, Anggaran Dasar berbunyi, “NU berdasar agama Islam dan bertujuan. menegakkan syari’at Islam dengan berhaluan salah satu daripada empat madzhab. melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat.” (pasal II asas dan tujuan AD/ART).<sup>6</sup>

Kelahiran PMII yang disponsori oleh 13 orang tokoh mahasiswa nahdliyin. Mereka berasal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Surabaya. Delapan kota inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya PMII di Indonesia. Persidangan dalam musyawarah mahasiswa nahdliyin bertempat di Gedung Madrasah Muallimin NU Wonokromo Surabaya dimulai tanggal 14 sampai 16 April 1960. Sedangkan peraturan dasar organisasi PMII dinyatakan mulai

---

<sup>6</sup>Pasal II asas dan tujuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PMII, *Hasil Kongres PMII ke-XX*, Makassar: PMII Nasional, 2021, h. 25-30.

berlaku pada 17 April 1960. Kelahiran PMII ini kemudian diproklamirkan di Balai Pemuda Surabaya dalam suatu acara yang mendapatkan perhatian besar dari massa mahasiswa, organisasi-organisasi ekstra dan intra dari berbagai universitas di Surabaya serta dihadiri juga oleh wakil-wakil dari partai politik.<sup>7</sup>

Pada tanggal 8 Juni 1960, Pengurus Pusat (PP) PMII mengirimkan surat kepada NU untuk mengesahkan kepengurusan PMII. Hal ini tidak lain karena PMII adalah organisasi yang dependen dengan Partai NU. Selanjutnya, pada tanggal 14 Juni 1960 Partai NU menyatakan bahwa organisasi PMII diterima sebagai keluarga besar partai dan diberi mandat untuk membentuk cabang-cabang di seluruh Indonesia. Yang menandatangani SK tersebut adalah DR. KH. Idham Chalid sebagai ketua Partai NU dan H. Aminuddin Aziz, Sekjend partai.<sup>8</sup>

## B. Makna Filosofis PMII

Sejak di deklarasikan di Surabaya pada 17 April 1960, PMII mendedikasikan dirinya sebagai wadah pergerakan yang secara jelas tertulis dalam tujuannya. Makna pergerakan dalam PMII adalah dinamika dari hamba (mahluk) yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya memberikan bagi alam sekitarnya. Dalam konteks individual maupun komunitas, peran PMII haruslah senantiasa mencerminkan pergerakannya menuju kondisi yang

---

<sup>7</sup>M. Syafi'i, "PMII dalam Konstelasi Gerakan Mahasiswa Indonesia," *Jurnal Sosial & Politik*, vol. 15, no. 2, 2020, h. 123.

<sup>8</sup>"Hasil-Hasil Musyawarah Pimpinan PMII." Dilaksanakan di Semarang, 11-14 Februari 2002, (Jakarta: PB PMII, 2002), 36-37.

lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawabnya memberi rahmat pada lingkungannya.<sup>9</sup>

Kata “Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada dalam kualitas kekhalifahannya. Pergerakan memiliki muatan-muatan nilai yang meliputi dinamika responsif, kreativitas, dan inovatif. Kandungan nilai-nilai tersebut mencirikan sebuah bentuk ideal dari format organisasi. Nilai dinamis mencerminkan sebuah pemberontakan atas kebakuan pemikiran, tradisi, dan lain sebagainya. Dari nilai-nilai ini diangankan sebuah proses menuju perbaikan-perbaikan kondisi faktual menuju sebuah tatanan ideal tanpa terjebak dalam sebuah utopia.<sup>10</sup>

Pengertian “mahasiswa” yang terkandung dalam PMII adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis, insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terdapat tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung jawab individual sebagai hamba Tuhan maupun sebagai bangsa dan negara. Mahasiswa

---

<sup>9</sup>S. Ma'arif, *Dinamika Gerakan Islam dan Peran PMII dalam Demokrasi*, Yogyakarta: LKiS, 2019, h. 42.

<sup>10</sup>PMII dan Transformasi Sosial di Era Digital,” *Kompas*, 20 April 2022, h. 7.

dianggarkan memuat kandungan-kandungan nilai-nilai intelektualitas, idealitas, komitmen, dan konsistensi.<sup>11</sup>

Pengertian “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami dengan haluan paradigma *Ahlussunah wal Jama'ah* (Aswaja), yaitu konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proposional antara iman, Islam, dan ihsan yang di dalam pola pikir, pola sikap, dan pola prilakunya tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif dan integratif. Faham Aswaja mencakup aspek aqidah, syari'ah, dan akhlak. Ketiganya merupakan satu kesatuan ajaran yang mencakup seluruh aspek prinsip keagamaan. Didasarkan pada pola pikir (manhaj) Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam bidang aqidah, empat imam madzhab besar dalam fiqih yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan bidang tasawuf menganut manhaj Imam Ghazali dan Imam Abu al-Qasim al-Junaid al-Baghdadi, serta para imam lain yang sejalan dengan syari'ah Islam.<sup>12</sup>

Pengertian “Indonesia” yang terkandung di dalam PMII adalah masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan ideologi Pancasila serta UUD 1945 dengan kesadaran kesatuan dan keutuhan bangsa serta negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang diikat dengan kesadaran wawasan Nusantara. Keindonesiaan yang dipahami oleh PMII merupakan

---

<sup>11</sup>R. Hidayat, "Aktivisme Mahasiswa dalam Gerakan Sosial," *Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 10, no. 1, 2021, h. 87-101

<sup>12</sup>Tim PWNU Jawa Timur, *Aswaja An-Nahdliyah*, (Surabaya: Kalista, 2007),3.

sebuah gugusan ide tentang Negara bangsa yang secara riil dibangun di atas fondasi pluralitas dan heterogenitas baik secara etnis, ras, agama maupun golongan. Secara totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri sebagai hamba yang bertaqwa kepada Allah SWT, dan atas dasar ketakwaan berperan mewujudkan peran ketuhanannya membangun masyarakat bangsa dan negara Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ampunan dan ridlo Allah SWT.<sup>13</sup>

Dalam Kongres X PMII tahun 1991 di Jakarta dilahirkan Deklarasi Format Profil PMII.<sup>19</sup> Deklarasi ini merupakan kristalisasi dari tujuan pergerakan sebagaimana tercantum dalam AD/ART, yakni, “terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang berbudi luhur, berilmu dan bertaqwa kepada Allah SWT, cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.” Bagi PMII ilmu pengetahuan merupakan alat untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT, untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembah keterbelakangan dan kebodohan. Karena hanya dengan ilmu manusia dapat sampai pada derajat taqwa yang sebenarnya. Ilmu, bagi PMII adalah untuk diamalkan dan diabdikan demi kebaikan (kemaslahatan) umat. Sebagai organisasi mahasiswa, PMII sadar bahwa dalam mengabdikan ilmu pengetahuan dan khitmat perjuangannya,

---

<sup>13</sup>M. Wahyudi, *PMII dan Nasionalisme Mahasiswa*, Bandung: Mizan, 2017, h. 68.

memerlukan keahlian dan profesionalitas secara bertahap, terencana dan menyeluruh.<sup>14</sup>

### C. Perkembangan PMII

Musyawarah mahasiswa nahdliyin di Surabaya hanya menghasilkan peraturan dasar organisasi. Maka untuk melengkapi peraturan organisasi tersebut, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh M. Said Budairi dengan anggota Chalid Mawardi dan Fahurrazi untuk merumuskan peraturan rumah tangga PMII. Dalam sidang yang dilaksanakan pada 8-9 September 1960, peraturan rumah tangga dinyatakan sah dan melengkapi peraturan dasar yang sudah ada sebelumnya. Sejak berdirinya PMII di Surabaya sampai dengan Kongres I PMII pada tanggal 23 sampai 26 Desember 1961 di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, PMII memiliki 13 Cabang, antara lain, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Bandung, Jakarta, Ciputat, Malang, Makasar, Surabaya, Banjarmasin, Padang, Aceh, dan Cirebon. Hasil dari Kongres I PMII memilih sahabat Mahbub Djunaidi sebagai ketua umum Pengurus Pusat PMII untuk periode 1961-1963. Dalam kongres juga melahirkan “Deklarasi Tawangmangu” yang berisi pernyataan sikap tentang sosialisme Indonesia, pendidikan nasional, kebudayaan nasional, dan tentang tanggung jawab sebagai kader PMII.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>“Kongres PMII dan Arah Baru Pergerakan Mahasiswa,” *Tempo*, 12 Mei 2023, h. 14-16.

<sup>15</sup>M. Rohman, *Peran PMII dalam Pembangunan Karakter Bangsa*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2020, h. 102.

Dalam Kongres PMII II yang diselenggarakan di Kaliurang Yogyakarta pada 25-29 Desember 1963 dihadiri 31 cabang PMII. 18 cabang di antaranya merupakan cabang baru, antara lain, Manado, Tulungagung, Serang, Jambi, Ambon, Jember, Purwokerto, Palembang, Medan, Martapura, Sibolga, Kudus, Bogor, Pematang Siantar, Bengkulu, Tasikmalaya, Kediri, dan Amuntai. Dalam Kongres tersebut dikeluarkan pokok-pokok pikiran antara lain, penegasan sebuah tekad PMII untuk selalu berpihak kepada amanat penderitaan rakyat, dan perlunya penyelenggaraan Konferensi Islam Asia Afrika, tentang perlunya kerja sama internasional, ukhuwah islamiyah, serta pernyataan bahwa PMII siap melaksanakan pernyataan itu tanpa *reserve*.<sup>16</sup>

Dalam usianya yang relatif masih muda, Pengurus Besar (PB) PMII di samping secara intens melakukan konsolidasi ke dalam untuk pembenahan dan pengembangan organisasi, juga secara aktif terlibat dalam dunia kemahasiswaan dan kepemudaan. Antara lain, Said Budairi, Sekretraris Umum PMII pada September 1960 mewakili PMII dalam konferensi pembentukan panitia internasional forum pemuda sedua di Moskow (*Contituente Metting for the youth forum*). Sepulang dari

---

<sup>16</sup>Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, *Manifesto Gerakan PMII di Era Reformasi*, Jakarta: PB PMII, 2019, h. 58-61.

Moskow, singgah di Mesir dalam rangka konsolidasi dengan mahasiswa NU yang berada di luar negeri.<sup>17</sup>

Pada bulan Juni 1961, Ketua I PB PMII yang diwakili oleh sahabat Chalid Mawardi berangkat ke Moskow untuk menghadiri forum pemuda sedunia. Hal ini membuktikan bahwa PMII bukanlah organisasi sempalan dari organisasi mahasiswa yang lebih dulu ada, tapi merupakan proses lanjut dari mahasiswa-mahasiswa nahdliyin yang tergabung dalam Departemen Perguruan Tinggi IPNU sebagai embrio terbentuknya suatu organisasi mahasiswa secara formal.<sup>18</sup>

#### 1. PMII dan Kebangkitan Orde Baru.

PMII sebagai organisasi mahasiswa yang juga berdimensi kepemudaan, dalam berbagai aktivitasnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal tersebut. Aktivitas PMII yang perlu dicatat adalah periode 1965-1968. Hal ini penting karena berkaitan dengan lahirnya angkatan baru dalam dunia kepemudaan Indonesia, yang kemudian dikenal dengan “Angkatan „66”. Lahirnya Orde Baru (Orba) diawali dari lemahnya kondisi perekonomian yang terjadi pada negara Indonesia. Pada tanggal 19-26 Desember 1964 di Jakarta diselenggarakan musyawarah nasional generasi Islam yang dikenal dengan GERMUIS. Musyawarah ini awalnya muncul dari gerakan pemuda Anshor, salah satu badan otonom dari Nahdlatul

---

<sup>17</sup>Ahmad Baso, *Islam Nusantara dan Peran PMII dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Pustaka NU, 2019, h. 97.

<sup>18</sup>Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-34, Lampung, 2021, terkait sinergi NU dan PMII.

Ulama'. Tujuannya adalah untuk memperkuat ukhuwah islamiyah yang pada saat itu sedang mengalami gejolak akibat fitnah yang dilancarkan oleh PKI. Hasil dari musyawarah tersebut memutuskan untuk membentuk suatu organisasi yang bersifat konfederatif. PMII dalam wadah yang baru ini duduk sebagai sekretaris jenderal presidium pusat yang diwakili oleh sahabat Said Budairy.<sup>19</sup>

Kelahiran Orba adalah merupakan koreksi total terhadap kebijakan Orde Lama (Orla). Situasi selama Orla dengan politik Berdikari membuat diberhentikannya semua bantuan dari luar negeri. Akibatnya rakyat sangat menderita, karena laju inflasi membumbung tinggi sampai 600 persen. Selain itu pemangkasan uang juga dilakukan berkali-kali, tetapi hal ini tidak mampu merubah keadaan. Keadaan yang sudah kritis ini ditambah dengan tindakan rezim Orla yang melakukan politik konfrontasi dengan Malaysia, yang mengakibatkan separuh dari anggaran belanja negara tersedot untuk kepentingan tersebut.<sup>20</sup>

Dalam situasi seperti itu, PKI memanfaatkan situasi dengan melemparkan isu bahwa Dewan Jenderal akan merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno. Dalam keadaan seperti itu rezim Orla dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu pihak, jika membubarkan PKI jelas akan berhadapan dengan Pemerintah

---

<sup>19</sup>J. Sudrajat, *Gerakan Mahasiswa dan Perubahan Sosial: Studi Kasus PMII*, Malang: UB Press, 2020, h. 115.

<sup>20</sup>"Sejarah Berdirinya PMII dan Relevansinya dengan Gerakan Mahasiswa," *Republika*, 21 April 2023, h. 5.

Komunis Cina yang mendukung Soekarno dalam politik konfrontasinya. Di sisi lain, jika terus mempertahankan PKI maka akan berhadapan sendiri dengan rakyatnya. Melihat situasi yang tidak menentu ini, para tokoh dan para aktivis mahasiswa ekstra kampus berinisiatif membentuk suatu wadah perjuangan untuk kembali menegakkan keadilan dan menyerukan aspirasi rakyat Indonesia yang tertindas. Mereka tampil dengan semboyan TRITURA (Tiga berisi antara lain, Bubarkan PKI berserta antek-anteknya, Retor menteri-menteri yang goblok, dan turunkan harga).<sup>21</sup>

Gerakan tersebut dipimpin oleh tokoh-tokoh mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Organisasi perjuangan ini didirikan di rumah Syarif Thoyib, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada 25 Oktober 1965. Organisasi ini didasarkan untuk memenuhi tiga landasan seperti yang dalam TRITURA dengan operasionalisasi program yaitu mengamankan Pancasila dan memperkuat bantuan kepada ABRI dalam menumpas G30S sampai ke akar-akarnya.<sup>22</sup>

Selain PMII, wadah KAMI didirikan dengan beberapa organisasi kemahasiswaan, antara lain, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen

---

<sup>21</sup>D. Ramadhan, *Islam dan Kebangsaan: Perspektif Aktivis PMII*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018, h. 83-90.

<sup>22</sup> Agus Salim Sitompul, *Sejarah Perjuangan HMI (1974-1975)*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), 74.

Indonesia), SOMAL (Serikat Bersama Organisasi-Organisasi Lokal), PELMASI (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia), MAPANCAS (Mahasiswa Pancasila), IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia). Hasil pertemuan inilah kemudian mendirikan organisasi mahasiswa yang anti komunis. Pembentukan KAMI ini kemudian juga diikuti dengan pembentukan organisasi serupa di perguruan tinggi di daerah-daerah baik di Jawa maupun di luar Jawa.<sup>23</sup>

Gerakan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI dengan cepat merebut kemenangan-kemenangan politik karena mendapatkan dukungan massa. Garis-garis yang ditentukan oleh PB PMII yaitu ikut dalam wadah KAMI mulai dari pusat sampai daerah. Bahkan sahabat Zamroni tampil memimpin KAMI sebagai ketua umum presidium pusat. Dengan posisi seperti itu menunjukkan bahwa PMII mempunyai andil yang besar dalam kegiatan dan mobilisasi KAMI dalam rangka kelahiran Orba.

KAMI bangkit menentang rezim Orla dengan turun ke jalan untuk berdemonstrasi karena jalan konstitusional sudah tidak mungkin dilalui. Karena KAMI inilah Orba dapat didorong mempercepat kelahirannya. Tetapi setelah Orba lahir dengan mapan, justru KAMI kehilangan vitalitasnya untuk eksis. Salah satu alasannya adalah karena organisasi ini lahir tidak berlandaskan pada konsepsi-konsepsi yang matang. Dalam bahasa

---

<sup>23</sup>Yahya Muhaimin, *Perkembangan Militer Dalam Politik Indonesia 1945- 1966*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), 203

mahasiswa pergerakan adalah organisasi yang bersifat taktis. Akhirnya pada rapat paripurna KAMI tahun 1969 para aktivis sudah tidak dapat dipertemukan lagi. Mulai saat itu KAMI dinyatakan bubar.<sup>24</sup>

## 2. Independensi PMII.

Awal berdirinya PMII adalah sebagai organisasi kepemudaan yang mendukung Partai NU. Namun dalam perkembangan selanjutnya, sikap dependensi itu menjadi sikap independensi, di mana PMII menjadi organisasi yang tidak terikat dari organisasi manapun, termasuk Partai NU. Sikap independen tersebut dideklarasikan pada tanggal 14 Juli 1972 di Murnajati, Lawang, Malang Jawa Timur. Deklarasi tersebut dikenal dengan “Deklarasi Murnajati.”<sup>25</sup>

Keterlibatan PMII dalam dunia politik praktis yang terlalu jauh pada Pemilu 1971 itu akhirnya merugikan PMII sebagai organisasi kepemudaan. Akibatnya PMII banyak mengalami kemunduran gerakannya. Gerakan mahasiswa sebenarnya jauh dari nilai-nilai status. Ini sangat berbeda dengan tujuan partai politik yang memang segala orientasi dan gerakannya mengarah pada kekuasaan. Kondisi ini akhirnya menyadarkan PB PMII untuk mengkaji peran yang selama ini dilakukan, khususnya dalam dunia politik praktis. Setelah melalui beberapa

---

<sup>24</sup>M. Gunawan “Dinamika Organisasi Mahasiswa Islam di Indonesia,” *Jurnal Studi Islam*, vol. 12, no. 3, 2021, h. 201-215.

<sup>25</sup>Laporan Kegiatan PMII Wilayah Jawa Timur, Surabaya, 2023.

pertimbangan yang mendalam, maka pada Musyawarah Besar (Mubes) II tanggal 14-16 Juli 1972 PMII melahirkan Deklarasi Independensi PMII Dengan Deklarasi Munarjati tersebut secara formal PMII berpisah secara struktural dengan NU. Ada dua hal yang penting, yaitu, pertama, komitmen independensi merupakan kesadaran PMII yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berfikir, dan pembangunan kreatifitas yang dijiwai nilai-nilai Islam. Kedua, sikap independensi merupakan sikap manifestasi kesadaran organisasi dari tuntutan kemandirian, kepeloporan, kebebasan berfikir dan berkreasi serta tanggung jawab sebagai kader umat dan negara.<sup>26</sup>

#### DEKLARASI MUNARJATI

Bismillahirrahmanirrahim

“kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dititahkan kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang mungkar” (Al- Qur’an).

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) insyaf dan yakin serta tanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera selaku penerus perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan spiritual. Bertekad untuk

---

<sup>26</sup>Fauzan Alfas, *PMII Dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan*, 57.

mempersiapkan dan mengembangkan dengan sebaik-baiknya:

- Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan insane-insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, taqwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.
- Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda Indonesia sadar akan perannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.
- Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealism sesuai dengan Deklarasi Tawangmangu menuntut berkembangnya sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa tanggung jawab.
- Berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia serta dengan memohon rahmat Allah SWT, dengan ini menyatakan diri sebagai
- “Organisasi Independen” yang tidak terikat dalam sikap dan tindakannya kepada siapapun dan hanya komitmen dengan perjuangan

organisasi dan cita-cita perjuangan Nasioanl  
yang berlandaskan Pancasila.

### Musyawarah Besar II

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Di Murnajati Lawang Malang

Jawa Timur 14 Juli 1972

TIM PERUMUS DEKLARASI MURNAJATI :

1. Umar Basalim
2. Madjidi Syah
3. Slamet Efendy Yusuf
4. Man Muhammad Iskandar
5. Choirunnisa Yafizham
6. Tatik Farikhah
7. Rahmadn Idrus
8. Muis Kabri

Sejak dikumandangkannya Deklarasi Murnajati, PMII menjadi organisasi yang bebas menentukan kehendak dan idealismenya, tanpa harus berkonsultasi dengan organisasi manapun, termasuk Partai NU. Akan tetapi keterpisahan secara struktural ini tidak membatasi ikatan emosional antara kedua organisasi ini. Antara keduanya masih mempunyai benang merah pemahaman ideologis, yaitu *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Keputusan Musyawarah Besar II PMII tentang Independensi PMII

ini kemudian dipertegas dalam Kongres V PMII di Ciloto, Bandung, Jawa Barat tahun 1973.

### 3. Interdependensi PMII

Sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan untuk saling tolong-menolong, ukhuwah islamiyah, serta harus mencerminkan prinsip-prinsip umat yang baik. Oleh karena itulah sebuah keniscayaan bahwa hubungan antara PMII dan NU harus dijalin kembali. Kerangka berfikir, perwatakan dan sikap social antara PMII dan NU mempunyai persamaan karena dikemas dalam pemahaman *Ahlussunah wal Jama'ah* (Aswaja).<sup>27</sup>

Selama 12 tahun lamanya PMII sebagai undebow Partai NU berkhidmat di dalam politik praktis, sampai pada akhirnya menyatakan sebagai organisasi yang independen adalah merupakan manifestasi kesadaran PMII yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berfikir, dan pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. Antara PMII dan NU mempunyai persamaan-persamaan dalam persepsi keagamaan dan perjuangan, visi sosial dan kemasyarakatan, ikatan historis, maka untuk menghilangkan keraguan serta saling curiga, maka hubungan itu harus dijalin kembali. PMII siap meningkatkan kualitas hubungan dengan NU atas dasar prinsip berkedaulatan organisasi penuh, interdependensi, dan tidak ada intervensi secara struktural dan

---

<sup>27</sup>Abdurrahman Wahid, *Islam, Demokrasi, dan Aktivisme Mahasiswa*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 150.

kelembagaan, serta prinsip mengembangkan masa depan Islam Aswaja Indonesia. Deklarasi Interdependensi antara PMII dan NU dicetuskan dalam Kongres X PMII pada tanggal 27 Oktober 1991 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta.<sup>28</sup>

Untuk mempertegas Deklarasi Interdependensi PMII-NU, melalui Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) PB PMII tanggal 24 Desember 1991, di Cimacan, Jawa Barat menghasilkan keputusan tentang “Impelementasi Interdependensi PMII-NU.” Penegasan hubungan itu didasarkan kepada pemikir-pemikiran antara lain:<sup>29</sup>

Pertama, bahwa dalam pandangan PMII ulama sebagai pewaris para nabi merupakan panutan karena kedalamannya dalam bidang keagamaan. Oleh karena itu, interdependensi PMII-NU ditempatkan pada konteks keteladanan ulama dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kedua, adanya ikatan kesejarahan yang mempertemukan antara PMII dan NU. Fakta sejarah bahwa PMII lahir dari dan dibesarkan oleh NU, demikian juga latar belakang mayoritas warga PMII yang berasal dari NU, secara langsung maupun tidak, akan mempengaruhi perwatakan PMII. Adapun kemudian menyatakan sebagai organisasi yang independen hendaknya tidak

---

<sup>28</sup>Jesika Oktaria "Peran PMII dalam Menjaga Pluralisme di Indonesia," *The Jakarta Post*, 5 Juni 2022.

<sup>29</sup>Deklarasi Interdependensi PMII-NU, melalui Musyawarah Kerja Nasional (Muskernas) PB PMII tanggal 24 Desember 1991, di Cimacan, Jawa Barat

dipahami sebagai upaya mengurangi, apalagi menghapus arti ikatan kesejarahan tersebut.

Ketiga, adanya persamaan faham keagamaan antara PMII dan NU. Keduanya sama-sama mengembangkan suatu faham wawasan keislamandengan paradigma faham *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Implikasi dari wawasan keislaman ini tampak pula pada persamaan sikap sosial yang bercirikan *tawasuth, I'tidal, tasamuh, tawazzun*, dan *amar makruf nahi munkar*. Demikian juga dalam pola pikir, pola sikap PMII dan NU menganut pola selektif, akomodatif, integratif sesuai dengan prinsip dasar *Al Muhafadzhotu al Qadimis Sholih Wakhzu Biljadi al Ashlah*.

Keempat, adanya persamaan kebangsaan. Bagi PMII keutuhan komitmen keislaman dan keindonesiaan merupakan perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap orang muslim Indonesia. Atas dasar tersebut, maka menjadi keharusan untuk mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dan kemampuan, baik secara individu maupun kelompok.

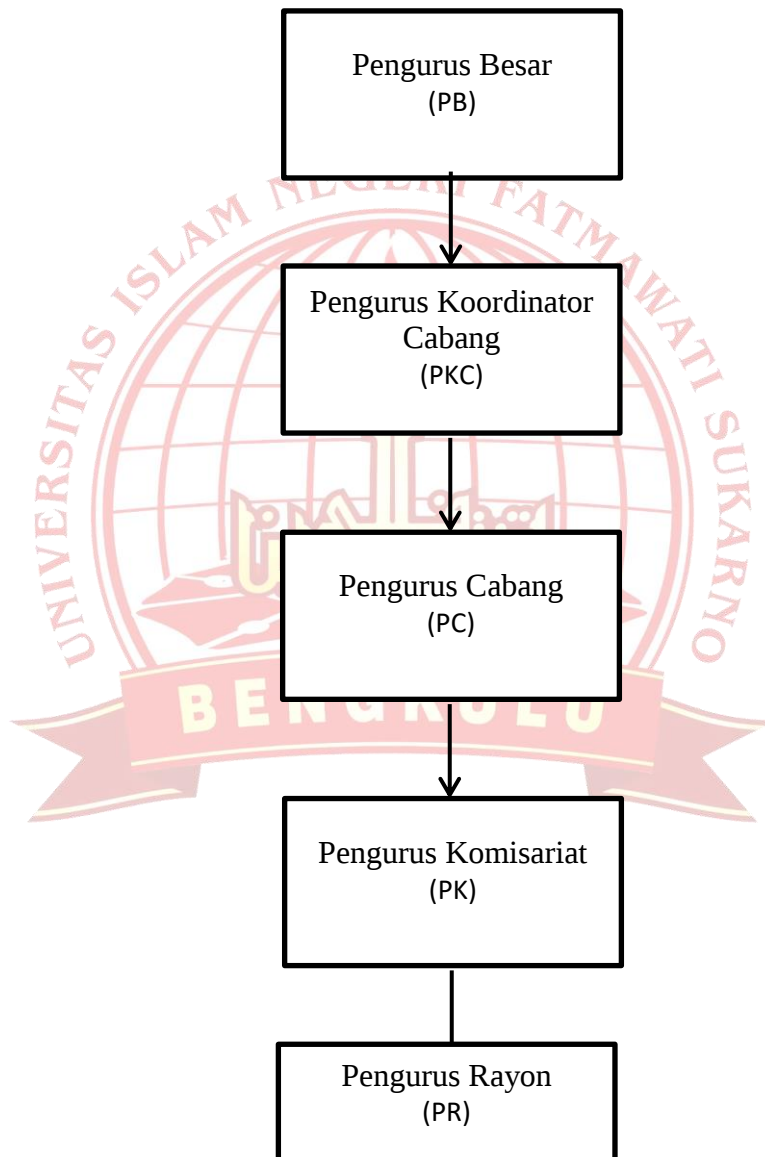
Kelima, adanya persamaan kelompok sasaran. PMII dan NU memiliki mayoritas anggota dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kesamaan lahan perjuangan ini kemudian melahirkan format perjuangan yang relatif sama.

#### D. Struktur Organisasi PMII

Adapun struktur organisasi PMII adalah sebagai berikut:<sup>30</sup>

Gambar 2.1

Struktur organisasi PMII



<sup>30</sup>Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PMII, *Hasil Kongres PMII ke-XX*, Makassar: PMII Nasional, 2021, hlm. 25-30.

Kekuasaan tertinggi PMII berada di Pengurus Besar (PB) yang berpusat di Jakarta. Pengurus Koordinator Cabang (PKC) menguasai tingkat provinsi yang membawahi cabang-cabang. Pengurus Cabang (PC) berada di setiap kota atau kabupaten. PC ini membawahi Komisariat yang berada di setiap universitas atau perguruan tinggi. Pengurus Komisariat (PK) membawahi pengurus Rayon (PR) yang berada di masing-masing fakultas. Adapun forum permusyawaratan dalam organisasi PMII adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Kongres merupakan forum musyawarah tertinggi dalam organisasi.

Kongres ini dilaksanakan dua tahun sekali dan dihadiri utusan cabang, sekurang-kurangnya separuh lebih satu dari jumlah cabang. Forum kongres ini memiliki kewenangan, antara lain, menetapkan atau merubah AD/ART PMII, menetapkan dan merubah NDP PMII, menetapkan paradigm gerakan PMII, menetapkan strategi pengembangan PMII, menetapkan kebijakan umum dan GBHO, menetapkan sistem pengkaderan PMII, dan menetapkan ketua umum dan Tim Formatur.

2. Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS).

Forum ini tertinggi setelah Kongres. Muspimnas ini dihadiri oleh seluruh Pengurus PB PMII, Ketua Umum PKC,

---

<sup>31</sup>Hasil-hasil Kongres XIV PMII di Sulawesi Tengah, 15-19 Mei 2017, 26-33.

dan Pengurs Cabang. Musyawarah ini sedikitnya diadakan satu kali selama satu kepengurusan.

3. Musyawarah Kerja Nasional (MUSKERNAS).

Forum ini dilaksanakan oleh pengurus PB PMII. Muskernas ini membuat dan menetapkan actionplanning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Kongres.

4. Konferensi Koordinator Cabang (KONKOORCAB)

Forum ini dihadiri oleh utusan cabang yang dilakukan satu tahun sekali. Konferkoorcab memiliki wewenang antara lain, menyusun program kerja koorcab dalam rangka pelaksanaan program dan kebijakan PMII, menilai laporan pertanggung jawaban (LPJ) PKC, dan memilih ketua umum koorcab dan tim formatur.

5. Musyawarah Pimpinan daerah (MUSPIMDA).

Forum ini adalah yang tertinggi setelah Konferkoorcab. Muspimda ini semua pengurus PKC dan ketua umum PC yang berada dalam wilayah kordinasinya. Muspimda diadakan paling sedikit enam bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspimnas. Muspimda ini mempunyai wewenang menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengevaluasi program selama satu semester baik bidang internal maupun eksternal, dan mengesahkan laporan organisasi dari berbagai wilayah kordinasi.

6. Musyawarah Kerja (MUSKER) Koorcab.

Musker Koorcab dilaksanakan oleh PKC minimal satu kali dalam satu kepengurusan. Forum ini berwenang memutuskan action planning berdasarkan program kerja yang diputuskan di Konferkorcab.

7. Konferensi Cabang (KONFERCAB).

Forum ini adalah yang tertinggi di tingkatan cabang. Konfercab ini dihadiri oleh utusan komisariat dan rayon. Selain menyusun program kerja dan menilai laporan pertanggungjawaban PC, juga memilih ketua umum dan tim formatur.<sup>32</sup>

8. Musyawarah Pimpinan Cabang (MUSPIMCAB).

Forum ini tertinggi setelah Konfercab. Muspimcab ini dihadiri oleh seluruh Pengurus Cabang dan ketua umum komisariat dan ketua umum rayon. Forum ini diadakan sedikitnya empat bulan sekali, sebelum pelaksanaan Muspimda. Muspimcab ini memiliki wewenang menetapkan dan merubah peraturan organisasi yang mengikat kondisi lokal, sepanjang yang tidak bertentangan dengan dengan peraturan yang lebih tinggi, mengevaluasi program selama satu semester, dan mengesahkan laporan organisasi dari pengurus komisariat dan pengurus rayon.

9. Musyawarah Kerja Cabang (MUSKERCAB).

---

<sup>32</sup> Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PMII, Hasil Kongres PMII ke-XX, Makassar: PMII Nasional, 2021, hlm. 25-30.

Forum ini berwenang untuk menyusun dan menetapkan actin plan selama satu periode berdasarkan hasil dari Konfercab. Peserta Muskercab ini adalah pengurus harian dan badan-badan di lingkungan PC.

10. Rapat Tahunan Komisariat (RTK).

Ini adalah forum tertinggi di tingkat komisariat yang dihadiri oleh utusan rayon. RTK ini dilaksanakan satu tahun sekali dengan wewenang antara lain, menyusun program kerja komisariat dan kebijakan PMII, menilai laporan pertanggungjawaban (LPj) pengurus komisariat, dan memilih ketua komisariat dan tim formatur.

11. Kongres Luar Biasa (KLB).

KLB merupakan forum setingkat dengan kongres. Forum ini dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/ atau peraturan organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Besar PMII.<sup>33</sup>

12. Konferensi Koordinator Luar Biasa (Konkoorcab-LB).

Forum ini setingkat dengan Konkoorcab. Forum ini dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/ atau peraturan organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Koordinator Cabang PMII. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB). Forum ini setingkat dengan Konfercab. Forum ini dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap

---

<sup>33</sup>Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PMII, *Hasil Kongres PMII ke-XX*, Makassar: PMII Nasional, 2021, hlm. 25-30.

konstitusi (AD/ART dan/ atau peraturan organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Cabang PMII.

13. Konferensi Cabang Luar Biasa (Konfercab-LB).

Forum ini setingkat dengan Konfercab. Forum ini dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/ atau peraturan organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Cabang PMII.

14. Rapat Tahunan Komisariat Luar Biasa (RTK-LB).

Forum ini setingkat dengan RTK. Forum ini dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/ atau peraturan organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Komisariat PMII.

15. Rapat Tahunan Anggota Rayon Luar Biasa (RTAR-LB).

Forum ini setingkat dengan RTAR. Forum ini dilaksanakan apabila terdapat pelanggaran terhadap konstitusi (AD/ART dan/ atau peraturan organisasi) yang dilakukan oleh Pengurus Rayon PMII.

**E. Keanggotaan PMII**

Sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), PMII adalah sebuah organisasi yang berasaskan Pancasila yang bersifat keagamaan, kemahasiswaan, kebangsaan, kemasyarakatan, independen, dan professional. Keanggotaan PMII dibagi menjadi anggota biasa dan anggota luar biasa. Anggota biasa adalah mahasiswa Islam yang tercatat sebagai mahasiswa pada suatu perguruan tinggi dan atau yang sederajat. Selain itu juga keanggotaan juga terbuka bagi

mahasiswa Islam yang telah menyelesaikan program studi pada perguruan tinggi dan atau yang sederajat atau telah mencapai gelar kesarjanaan S1, S2, atau S3 tetapi belum melampaui jangka waktu 3 tahun serta belum melampaui usia 35 tahun.<sup>34</sup>

Anggota luar biasa adalah anggota yang dianggap telah berjasa kepada PMII yang ditetapkan oleh PB PMII atau kongres berdasarkan kriteria-kriteria yang diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri. Untuk menjadi anggota PMII, calon anggota mengajukan permintaan secara tertulis atau mengisi formulir untuk menjadi anggota kepada pengurus cabang. Anggota akan sah menjadi keluarga PMII setelah mengikuti Masa Penerimaan Anggota Baru (Mapaba) dan mengucapkan bai'at persetujuan dalam suatu upacara pelantikan yang diadakan oleh pengurus cabang.

Anggota dapat berakhir masa keanggotaannya apabila, meninggal dunia, atas permintaan sendiri secara tertulis yang disampaikan kepada pengurus cabang, diberhentikan sebagai anggota biasa, baik secara terhormat maupun secara tidak hormat. Anggota biasa yang telah habis masa keanggotaannya disebut alumni. Hubungan PMII dengan alumni adalah hubungan historis, kekeluargaan, dan kesetaraan.

Anggota PMII berhak atas pendidikan, kebebasan berpendapat, dan pembelaan serta pengampunan (rehabilitas).

---

<sup>34</sup>Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PMII, *Hasil Kongres PMII ke-XX*, Makassar: PMII Nasional, 2021, hlm. 25-30.

Selain itu anggota juga berkewajiban membayar uang pangkal dan iuran setiap bulan yang besarnya ditentukan oleh pengurus cabang. Anggota juga berkewajiban mentaati AD/ART, peraturan lainnya serta mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PMII. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mempertahankan nama baik agama Islam, bangsa dan organisasi.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup>Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PMII, *Hasil Kongres PMII ke-XX*, Makassar: PMII Nasional, 2021, hlm. 25-30.